

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R. H. B., Indah, N. D., dan Priyo, K. 2011. Kajian Strategi Implementasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Studi Kasus Di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 8 (2), 167 – 188.
- Afriani, I. 2014. Analisis Kelembagaan pada Masyarakat di Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Tanggamus. Kerja sama Konsorsium Kota Agung Utara dan STIPER Dharma Wacana Di Kabupaten Tanggamus.
- Aminah, L. N. 2018. Analisis Kelembagaan Gapoktan di Kesatuan Pengelolaan Hutan IX Kota Agung Utara Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Thesis. Lampung, Universitas Lampung. 86 hlm.
- Aprilianti, D. 2017. Penilaian Potensi Objek Wisata Air Terjun Puteri Malu Kampung Jukuh Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Universitas Lampung.
- Arifin, B., Swallow, B.M., Suyanto, S., dan Coe, R., 2019. Analisis gabungan preferensi petani untuk kontrak hutan kemasyarakatan di DAS Sumber Jaya, Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. 68:2040- 2050.
- Asmoro, H. Sumardjo, Susanto, D., dan Tjitropranoto, P. 2021. *Empowerment Quality Improvement Of Forest Farmer Groups In Non-Timber Forest Products Management*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 18(1), 15-2. DOI: <https://doi.org/10.20886/jpsek.2021.18.1.15-25>
- Azizah, L., Ichsan, A. C., dan Webliana, K. 2021. Analisis Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Waku Lani Desa Lenek Duren Dan Desa Toya Lombok Timur. *Jurnal Sylva Scientiae*. 4(1), 84-97.
- Budi, Kartodihardji, H., Nugroho, B., Mardiana, R. 2021. *Implementation of Social Forestry Policy: Analysis of Community Access*. *Jurnal Forest and Society*. 5 (1), 60-74. DOI: <https://doi.org/10.24259/FS.V5I1.9859>
- Darmanto. 2014. Tata Kelola dalam Pengelolaan Hutan Lindung. Disertasi. Universitas Terbuka.
- Dewi, I. N., San, A. A., Wahyu. A., dan Priyono, S. 2017. Pengembangan Ekowisata Kawasan Hutan dengan Skema Hutan Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manusia & Lingkungan*. 24(2), 95-102.
- Dewi, I. N., San, A. A., Wahyu. A., dan Priyono, S. 2018. Karakteristik Petani dan Kontribusi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Terhadap Pendapatan Petani di Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 12(1), 86-98.

- Elva, K. H., Febryano, I. G., dan Yuwono, S.Y. 2017. Kajian Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Dalam Program Kemitraan Di Kphp Way Terusan. *Jurnal Hutan Tropis*. 5(1), 1-7.
- Eman, J. J., Baroleh, J., dan Loho, A. E. 2017. Peran Pendamping Terhadap Pemberdayaan Kelompok Tani Kakao Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Sosio Ekonomi Unsrat*. 13 (2), 1–10.
- Fauzi, M. dan Nahlunnisa, H. 2021. Studi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Di Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Silva Samalas*. 4(1), 20-26.
- Febrinastri, F., & Hapsari D. K. (2019). Ini 5 Kunci Utama Good Governance Menurut Menteri LHK. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Organisasi*. 2 (1), 47-60.
- Fito, A., Rahmat, S., Indra, G. F., dan Hari, S. 2020. Kinerja Lembaga Pengelola Hutan Desa Muara Danau Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal kehutanan*. 5(1), 17-27.
- Gustika, D., Suwarno, E., dan Insusanty, E. 2020. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kelompok Tani Hutan Mitra Upt Kphp Minas Tahura. *Jurnal Kehutanan*. 15(1).
- Karim, A. 2017. Mengembangkan Kesadaran Melestarikan Lingkungan Hidup berbasis Humanisme Pendidikan Agama. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. 12(2).
- Kaskoyo, H., Mohammed, A. J., dan Inoue, M. 2017. Status program Hutan Kemasyarakatan (HKm) saat ini di hutan lindung dan tantangannya. Studi kasus di Provinsi Lampung, Indonesia, 36(3), 250-263.
- Malika, U. E., Tejasari dan Hani, E. S. 2012. Perumusan strategi peningkatan mutu teknik produksi ikan guramii *Osphoronemus gourami* berdasarkan metode *Force Field Analysis* (FFA). *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. 6(1), 12-19.
- Marasabessy, I., Fahrudin, A., Imran, Z., dan Agus, S. B. 2017. Pengelolaan Berkelanjutan Perikanan Demersal Di Kawasan Pulau Nusa Manu Dan Nusa Leun Maluku Tengah. *Jurnal Penelitian Perikanan*. 2(1), 13-27.
- Markum, Andy, C. I., Dwi, S. R., dan Maiser, S. 2022. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Tata Kelola Kelembagaan dan Usaha Aren Pada Hutan Kemasyarakatan di Aik Bual Lombok Tengah. *Jurnal Siar Ilmuwan Tani*. 1(2).
- Martial, T. 2014. Kontribusi hasil hutan bukan kayu dari hutan produksi terbatas bagi pendapatan rumah tangga masyarakat. *Peronema Forestry Science Journal*. 3(2).

- Marthin, A. H., Sudung, S., dan Vivi, C. 2020. Efek Mediasi Motivasi Atas Hubungan Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kehutanan UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Pematangsiantar. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*. 3 (2).
- Mpesau, A. 2021. Studi Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Dalam Penebangan Hutan Diluar Rencana Kerja Tahunan Pada Pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*. 2(1), 19-28.
- Nurhikmah, Asar, S. M., dan Supratman, S. 2018. Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Hutan Kemasyarakatan di Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 10(2), 246-256.
- Palmonia, M., Sudomo, A., dan Mulyana, S. 2020. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dalam Pengembangan Hutan Rakyat Berbasis Jamblang (*Syzygium Cummini Linn*). *Jurnal Ilmu Bumi dan Lingkungan*. 012058. DOI 10.1088/1755-1315/449/1/012058.
- Permana J. 2019. Strategi Keberhasilan Program Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Pakpak Bharat. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.
- Pio, R. J. 2019. Tata Kelola Usaha Tani Dalam Perspektif Kelompok Tani Karoong Desa Talikuran Kecamatan Sonder. *Jurnal The Studies of Social Science*. 1(1), 1-6.
- Prasetyono, D.W. 2019. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani sebagai Pilar Pemberdayaan Petani. *Prosiding PKM-CSR*. 1285-1293.
- Putri, A. D., dan Setiawina, N. D. 2013. Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin Di Desa Bebandem. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 2(4), 173-180.
- Putri. R. D. 2017. Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Berdasarkan Aspek Tata Kelola Kelembagaan Dan Tata Kelola Usaha Di Hkm Senggigi Kabupaten Lombok Barat. Skripsi. Program Studi Kehutanan Universitas Mataram.
- Ruhimat, I. S. 2017. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani dalam Pengembangan Usaha Tani Agroforestry di Desa Cukangkawung. *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan*. 14(1), 1-17.
- Salaka, F. J., Alviya, I., Suryandari, E.Y., Nurfatriani, F., dan Muttaqin, M.Z. 2020. *The Effectiveness Of Local Institutional Arrangement For Community Plantation Forest*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 17 (1),75-92. DOI: <https://doi.org/10.20886/jakk.2020.17.1.75-92>

- Safe'i, R., Febryano, I. G., dan Aminah, L. 2018. Pengaruh keberadaan gabungan kelompok tani terhadap pendapatan petani dan perubahan tutupan lahan di hutan kemasyarakatan. *Jurnal Sosiohumaniora*, 20(2), 109-114.
- Sanjaya, R., Christine, W., dan Susni, H. 2017. Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pada Gabungan Kelompok Tani Hutan Rukun Lestari Sejahtera Di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Sanudin, Awang, A. S., Sandono, R., dan Pruwanto, H.R. 2016. Perkembangan Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 23 (2), 280.
- Septiadi, D., dan Mundiayah, A. I. 2020. Strategi Pengembangan Usaha Tani Sayuran Berbasis Pertanian Organik. *Jurnal AGRIFO*. 5(1).
- Simanjuntak, P. A. 2020. Pengaruh Etos Kerja, Kepuasan Kerja, Sikap Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. *Manajemen Bisnis Jurnal Magister Manajemen*, 2(1), 48–55.
- Soejono, D., Zahrosa, D. B., Maharani, A. D., dan Amam. 2021. Performa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 5(3), 935-949.
- Sulistya, E. 2019. Kelembagaan Pengurusan Kehutanan Pada Era Desentralisasi (Study Kasus Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 6(1), 69 – 81.
- Supriyanto, Ikhsan, M., Wekke, I. S., dan Gunawan, F. 2018. *Islam and Local Wisdom: Religious Expression in Southeast Asia*. Deepublish. Yogyakarta.
- Suwarto dan Suharto. 2014. Analisis Kemampuan Penggerakan Pimpinan Dan Pengendalian Internal Dengan Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Tata Kota Dan Pariwisata Kota Metro. 8(1).
- Syahyuti. 2003. *Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan Dan Penerapannya Dalam Penelitian Pertanian*. Bogor: Puslibtang Sosek Pertanian.
- Terunanegara, I. P., Agusdin, dan Suparman, L. 2017. Analisis kebutuhan pengembangan sumber daya manusia setelah penerapan SMM ISO 9001: 2008 di Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Mataram. *JMM. Jurnal Magister Manajemen*. 6(4), 1-14.
- Wulandari, C., Bintoro, A., Rustia, Santoso, T., Duryat, Kasyoko, H., Erwin, dan Budiono., P. 2018. *Community forestry adoption based on multipurpose tree species diversity towards to sustainable forest management in ICEF*

of University of Lampung, Indonesia. Jurnal Biodiversitas. 19(3), 1102-1109. DOI: <https://doi.org/10.13057/biodiv/d190344>

Yenny, C. AR., Irfan, M. R. 2022. Tata Kelola Kehutanan di Provinsi Jambi. *Jurnal Niara. 15 (3), 443-453.*

Lampiran 1. Data Responden

No	Nama Responden	Umur (Tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Jabatan
1.	Munir	53	S1	PNS	Ketua
2.	Murdiyanto	29	D3	Petani	Sekretaris
3.	Sudirman	45	SD	Petani	Bendahara
4.	Makmur	48	SMP	Petani	Anggota
5.	Abdul Haris	59	SD	Petani	Anggota
6.	Suherman	42	SD	Petani	Anggota
7.	H. Akbar	54	SD	Petani	Anggota
8.	H. Muslimin	50	SD	Petani	Anggota
9.	Muh. Idrus	60	SMA	Petani	Anggota
10.	Anwar	43	SD	Petani	Anggota
11.	A. Manggasali	49	SMP	Petani	Anggota
12.	M. Saleh	48	SD	Petani	Anggota
13.	Arapah	58	SD	Petani	Anggota
14.	Kaharuddin	50	SD	Petani	Anggota
15.	Hapsa	46	SD	Petani	Anggota
16.	Juhria	46	SMA	Petani	Anggota
17.	Muhammad Nur	46	SMA	Petani	Anggota
18.	Nurdin	41	S1	PNS	Anggota
19.	Fadli	26	SMA	Petani	Anggota
20.	Amiruddin	56	SD	Petani	Anggota
21.	Baso	54	SD	Petani	Anggota

Lampiran 2. Penilaian Kemampuan Kelola Kelembagaan

Aspek dan Indikator Penilaian Kemampuan Kelola Kelembagaan	Nilai Maksimal Aspek	Nilai Maksimal Indikator	Bukti Fisik
1. Dasar hukum pendirian Kelompok Tani Hutan (KTH)		30	
a. Badan Hukum / Akte Notaris	30		
b. Surat Keputusan Kepala Desa	20		
c. Berita Acara Pembentukan KTH	10		
d. Belum memiliki dasar hukum	0		
2. Kepengurusan		20	
a. Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi-seksi dengan uraian tugas dan semua berjalan sesuai dengan fungsinya	20		
b. Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi-seksi dengan uraian tugas tapi belum berjalan sesuai dengan fungsinya	15		
c. Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi-seksi tanpa uraian tugas	10		
d. Ketua, Sekretaris, Bendahara	5		
3. Keikutsertaan kaum wanita dalam kepengurusan dan anggota kelompok		15	
a. > 20 %	15		
b. 10 - 20 %	10		
c. < 10 %	5		
4. Perencanaan Kegiatan Kelompok (RKK)		20	
a. Rencana Jangka Panjang, Menengah, Tahunan	20		
b. Rencana Jangka Menengah, Tahunan	15		
c. Rencana Tahunan	10		
d. Belum memiliki rencana kegiatan kelompok	0		
5. Kehadiran anggota dalam pertemuan KTH		30	Daftar hadir kegiatan
a. > 75 % hadir	30		
b. 51 - 75 % hadir	20		
c. 30 - 50 % hadir	10		
d. < 30 % hadir	5		
6. Rata-rata kehadiran pengurus / anggota dalam setiap		30	Daftar hadir kegiatan

pelaksanaan kegiatan kelompok			
a. > 75 % hadir	30		
b. 51 - 75 % hadir	20		
c. 30 - 50 % hadir	10		
d. < 30 % hadir	5		
7. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kelompok		15	
a. Dilakukan oleh pengurus dan Anggota secara partisipatif, periodik, dan terdokumentasi	15		
b. Dilakukan oleh pengurus dan Anggota secara partisipatif serta terdokumentasi	10		
c. Dilakukan oleh pengurus dan terdokumentasi	5		
d. Tidak dilakukan pemantauan	0		
8. Kelengkapan sekretariat KTH (papan nama KTH, papan informasi, pondok pertemuan, perpustakaan, peta wilayah kelola, struktur organisasi, dll).		30	Papan nama KTH, papan informasi, dan struktur organisasi
a. > 5 unsur	30		
b. 3-5 unsur	20		
c. < 3 unsur	10		
d. Belum memiliki	0		
9. Aturan yang dimiliki kelompok		20	
a. AD / ART	20		
b. Aturan lain tertulis	15		
c. Aturan tidak tertulis	10		
d. Belum memiliki aturan atau norma kelompok	0		
10. Kelengkapan administrasi kelompok : buku tamu, buku daftar anggota, buku daftar hadir pertemuan, notulen rapat, buku kas, buku tabungan, buku simpan pinjam, buku inventaris barang, buku informasi, buku catatan hasil kegiatan		15	Buku tamu, buku daftar anggota, buku daftar hadir pertemuan, notulen rapat, dan buku kas
a. > 5 buku	15		
b. 3-5 buku	10		
c. < 3 buku	5		
d. Belum memiliki buku administrasi kelompok	0		

11. Frekuensi pertemuan KTH		15	Jika rutin maka perencanaannya sudah bagus
a. 1 bulan sekali	15		
b. 2 bulan sekali	10		
c. 3 bulan sekali	5		
d. > 3 bulan sekali	0		
12. Keikutsertaan pengurus / anggota dalam kegiatan peningkatan kapasitas		20	Pelatihan / kursus / magang
a. > 3 orang	20		
b. 2 -3 orang	15		
c. 1 orang	10		
d. Tidak ada	0		
13. Jenis pelatihan bidang kehutanan yang diikuti oleh Pengurus / Anggota dalam 3 tahun terakhir		15	Pemanfaatan hasil hutan, peningkatan kelas kelompok dan sosialisasi pengelolaan kawasan hutan
a. > 3 jenis	15		
b. 2-3 jenis	10		
c. 1 jenis	5		
d. Belum ada yang pernah mengikuti pelatihan	0		
14. Keterlibatan KTH dalam program pemerintah / LSM / Lembaga lainnya		15	Kegiatan Lomba, Kampanye, Gerakan-gerakan
a. > 5 kegiatan	15		
b. 2-5 kegiatan	10		
c. 1 kegiatan	5		
d. Tidak terlibat	0		
15. Bentuk kearifan lokal yang dikembangkan dalam kegiatan KTH		15	
a. > 3 jenis	15		
b. 2-3 jenis	10		
c. 1 jenis	5		
d. Tidak ada	0		
16. Jumlah kelompok baru yang terbentuk		15	
a. > 3 kelompok	15		
b. 2-3 kelompok	10		
c. 1 kelompok	5		

d. Tidak ada	0		
17. Jumlah PKSM yang terbentuk		20	
a. > 3 orang	20		
b. 2-3 orang	15		
b. 2-3 orang	10		
d. Tidak ada	0		
18. Jumlah anggota yang potensial menjadi kader pengurus KTH		20	
a. > 3 orang	20		
b. 2-3 orang	15		
c. 1 orang	10		
d. Tidak ada	0		
Jumlah Skor	180	360	

Lampiran 3. Penilaian Kemampuan Kelola Kawasan

Aspek dan Indikator Penilaian Kemampuan Kelola Kawasan	Nilai Maksimal Aspek	Nilai Maksimal Indikator	Bukti Fisik
1. Pemahaman anggota terhadap batas-batas wilayah kelola kelompok		20	
a. > 75% paham	20		
b. 51-75% paham	15		
c. 30-50% paham	10		
d. <30 % paham	0		
2. Penataan dan pemetaan wilayah kelola kelompok		20	
a. Dilakukan secara partisipatif oleh seluruh anggota	20		
b. Dilakukan secara partisipatif oleh sebagian anggota	15		
c. Dilakukan oleh pihak lain	10		
e. Belum dilakukan	0		
3. Pengenalan potensi dan daya dukung wilayah kelola kelompok		20	
a. Diidentifikasi, dipetakan dan didokumentasikan dengan baik	20		
b. Diidentifikasi, dipetakan dan belum didokumentasikan dengan baik	15		
c. Diidentifikasi tetapi belum dipetakan dan didokumentasikan	10		
d. Belum diidentifikasikan	0		
4. Identifikasi dan pemetaan permasalahan wilayah kelola kelompok		20	
a. Diidentifikasi, dipetakan dan didokumentasikan dengan baik	20		
b. Diidentifikasi, dipetakan dan belum didokumentasikan dengan baik	15		
c. Diidentifikasi tetapi belum	10		

dipetakan dan didokumentasikan			
d. Belum diidentifikasi	0		
5. Pemanfaatan wilayah kelola kelompok sesuai dengan potensi		20	
a. Terdapat rencana pemanfaatan tertulis sesuai dengan potensi dan diketahui oleh para pihak	20		
b. Terdapat rencana pemanfaatan tertulis sesuai dengan potensi dan belum diketahui oleh para pihak	15		
c. Rencana pemanfaatan masih dalam proses	10		
d. Belum ada rencana pemanfaatan	0		
6. Aktivitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi		20	Penanaman pohon mahoni
a. > 3 kegiatan	20		
b. 2-3 kegiatan	15		
c. 1 kegiatan	10		
d. Tidak ada	0		
7. Aktivitas kelompok dalam melakukan konservasi sumberdaya hutan		20	Masih rencana
a. > 3 kegiatan	20		
b. 2-3 kegiatan	15		
c. 1 kegiatan	10		
d. Tidak ada	0		
8. Dampak terhadap peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan dan lingkungan dalam bentuk kelompok / organisasi		20	Ada keikutsertaan kelompok / organisasi yang mengikuti kegiatan KTH
a. > 3 kelompok/ organisasi	20		
b. 2-3 kelompok / organisasi	15		
c. 1 kelompok / organisasi	10		
d. Tidak ada	0		
9. Dampak terhadap lingkungan		20	Penambahan sumber mata air, pengurangan

			lahan kritis, pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan kebakaran hutan, dll.
a. > 3 dampak	20		
b. 2-3 dampak	15		
c. 1 dampak	10		
d. Belum ada	0		
10. Perolehan sertifikat pengelolaan hutan lestari (PHBML/SVLK dan lainnya)		20	
a. Sudah memperoleh sertifikat	20		
b. Dalam proses penilaian	15		
c. Dalam proses pengajuan	10		
d. Belum ada proses	0		
11. Komoditas yang diusahakan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Pengurusan perijinan produk (PIRT, Sertifikat halal, dll)		20	
a. Sudah memperoleh sertifikat	20		
b. Dalam proses penilaian	15		
c. Dalam proses pengajuan	10		
d. Belum ada proses	0		
Jumlah Skor	85	200	

Lampiran 4. Penilaian Kemampuan Kelola Usaha

Aspek dan Indikator Penilaian Kemampuan Kelola Usaha	Nilai Maksimal Aspek	Nilai Maksimal Indikator	Bukti Fisik
1. Pertambahan modal usaha		40	
a. > 50 % dari modal usaha	40		
b. 25-50 % dari modal usaha	30		
c. < 25 % dari modal usaha	20		
d. Belum ada	0		
2. Sumber penambahan modal usaha		40	
a. Lembaga keuangan	40		
b. Mitra usaha	30		
c. Pemerintah	20		
d. Belum ada	0		
3. Pengembangan jenis usaha / diversifikasi produk		45	
a. > 2 jenis	45		
b. 2 jenis	30		
c. 1 jenis	15		
d. Tidak bertambah jenis	0		
4. Melakukan temu usaha dengan pelaku usaha		30	Merintis kerja sama dengan pelaku usaha, ,melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pelaku usaha, melakukan pertemuan dengan pelaku usaha, dll.
a. > 2 kali	30		
b. 2 kali	20		
c. 1 kali	10		
d. Tidak pernah	0		
5. Menjalin kemitraan dengan perjanjian / MoU		30	

a. > 2 kemitraan / MoU	30		
b. 2 kemitraan / MoU	20		
c. 1 kemitraan / MoU	10		
d. Tidak bertambah kemitraan / MoU	0		
6. Cakupan tujuan hasil usaha kelompok		30	Bukti wawancara dan dokumentasi
a. Internasional / Nasional	30		
b. Provinsi	20		
c. Kabupaten / Kota / Kecamatan	10		
d. Desa	0		
7. Peningkatan pendapatan total kelompok dalam satu tahun terakhir		45	
a. Sampai dengan 3 kali lipat	45		
b. Sampai dengan 2 kali lipat	30		
c. Sampai dengan 1 kali lipat	15		
d. Belum ada peningkatan pendapatan	0		
8. Pemanfaatan akses informasi dan teknologi dari berbagai sumber		45	Instansi teknis, lembaga penelitian, swasta, internet dalam rangka pengembangan usaha
a. > 3 sumber	45		
b. 2-3 sumber	30		
c. 1 sumber	15		
d. Belum ada	0		
9. Penyerapan tenaga kerja dari usaha kelompok		45	Tenaga kerja diluar anggota kelompok
a. > 20 orang	45		
b. 10-20 orang	30		
c. < 10 orang	15		

d. Belum ada	0		
10. Peningkatan omset / pendapatan dari usaha / produksi utama		45	Uang dan barang
a. > 50 % dari modal usaha	45		
b. 25-50 % dai modal usaha	30		
c. < 25 % dari modal usaha	15		
d. Belum ada	0		
11. Peningkatan / omset pendapatan dari turunan usaha / produksi		45	Uang dan barang
a. > 50 % dari modal usaha	45		
b. 25-50 % dai modal usaha	30		
c. < 25 % dari modal usaha	15		
d. Belum ada	0		
Jumlah Skor	20	440	

Lampiran 5. Matriks perbandingan berpasangan AHP antar aspek

	Kelola kelembagaan	Kelola Kawasan	Kelola Usaha
Kelola kelembagaan	1	1	1
Kelola Kawasan	1	1	1
Kelola Usaha	1	1	1
Total	3	3	3

CI	0,00
RI	0,58
CR	0,00

	Kelola kelembagaan	Kelola Kawasan	Kelola Usaha	Total	eigen vektor	Lamda
Kelola kelembagaan	0,33	0,33	0,33	1,00	0,33	1,00
Kelola Kawasan	0,33	0,33	0,33	1,00	0,33	1,00
Kelola Usaha	0,33	0,33	0,33	1,00	0,33	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,00

Lampiran 6. Matriks perbandingan berpasangan AHP faktor pendorong

Kelola kelembagaan

	Adanya akses legal berupa IUPHKm	Adanya struktur kepengurusan	Dilakukan kegiatan	Adanya pendamping
Adanya akses legal berupa	1	0,4	0,25	0,31
Adanya struktur kepengurusan	2,5	1	0,29	0,27
Dilakukan kegiatan	4	3,5	1	0,44
Adanya pendamping KTH	3,25	3,75	2,25	1
Total	10,75	8,65	3,79	2,02

CI	0,09
RI	0,9
CR	0,10

	Adanya akses legal berupa IUPHKm	Adanya struktur kepengurusan	Dilakukan kegiatan	Adanya pendamping	Total	Eigen vektor	Lamda
Adanya akses legal berupa IUPHKm	0,093	0,046	0,07	0,15	0,358	0,089	0,961
Adanya struktur kepengurusan kelompok	0,233	0,116	0,08	0,13	0,556	0,139	1,202
Dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas	0,372	0,40	0,26	0,22	1,261	0,315	1,193
Adanya pendamping KTH	0,30	0,43	0,59	0,50	1,83	0,46	0,921
Total	1	1	1	1	4	1	4,278

Kelola kawasan dan kelola usaha

	Adanya potensi pemanfaatan jasa lingkungan	Adanya sarana prasarana yang mendukung dalam pengelolaan HKm	Adanya perusahaan bermitra dengan KTH
Adanya potensi pemanfaatan jasa lingkungan	1	0,800	0,800
Adanya sarana prasarana yang mendukung dalam pengelolaan HKm	1,25	1	0,800
Adanya perusahaan bermitra dengan KTH	1,25	1,25	1
Total	3,50	3,05	2,60

CI	0,00
RI	0,58
CR	0,15

	Adanya potensi pemanfaatan jasa lingkungan	Adanya sarana prasarana yang mendukung dalam pengelolaan HKm	Adanya perusahaan bermitra dengan KTH	Total	Eigen Vektor	Lamda
Adanya potensi pemanfaatan jasa lingkungan	0,29	0,26	0,31	0,86	0,29	1,00
Adanya sarana prasarana yang mendukung dalam pengelolaan HKm	0,36	0,33	0,31	0,99	0,33	1,01
Adanya perusahaan bermitra dengan KTH	0,36	0,41	0,38	1,15	0,38	1,00
Total	1	1	1	3	1	3,01

Lampiran 7. Matriks perbandingan berpasangan AHP faktor penghambat

Kelola kelembagaan

	Kepengurusan KTH belum berjalan sesuai fungsinya	Pertemuan KTH tidak rutin	Kurangnya keterlibatan anggota dalam	Pendamping tidak aktif dalam hal memantau kegiatan KTH
Kepengurusan KTH belum berjalan sesuai fungsinya	1	0,44	0,40	1
Pertemuan KTH tidak rutin	2,25	1	0,44	1
Kurangnya keterlibatan anggota dalam pembentukan	2,5	2,25	1	0,4
Pendamping tidak aktif dalam hal memantau kegiatan KTH	1	1	2,5	1
Total	6,75	4,69	4,34	3,4

CI	0,03
RI	0,9
CR	0,04

	Kepengurusan KTH belum berjalan sesuai fungsinya	Pertemuan KTH tidak rutin	Kurangnya keterlibatan anggota dalam	Pendamping tidak aktif dalam hal memantau kegiatan KTH	Total	Eigen Vektor	Lamda
Kepengurusan KTH belum berjalan sesuai fungsinya	0,148	0,09	0,09	0,294	0,629	0,157	1,061
Pertemuan KTH tidak rutin	0,333	0,213	0,10	0,294	0,943	0,236	1,106
Kurangnya keterlibatan anggota dalam pembentukan	0,370	0,479	0,230	0,118	1,197	0,299	1,301
Pendamping tidak aktif dalam hal memantau kegiatan KTH	0,148	0,213	0,092	0,294	0,747	0,187	0,635
Total	1	1	1	1	4	1	4

Kelola kawasan

	Kurangnya partisipasi anggota dalam pengelolaan HKm	Tanaman agroforestri belum dikembangkan dengan baik
Kurangnya partisipasi anggota dalam pengelolaan HKm	1	0,33
Tanaman agroforestri belum dikembangkan dengan baik	3	1
Total	4	1,33

	Kurangnya partisipasi anggota dalam pengelolaan HKm	Tanaman agroforestri belum dikembangkan dengan baik	Total	Eigen Vektor	Lamda
Kurangnya partisipasi anggota dalam pengelolaan HKm	0,25	0,25	0,50	0,25	1
Tanaman agroforestri belum dikembangkan dengan baik	0,75	0,75	1,50	0,75	1
Total	1	1	2	1	2

CI	0
RI	0
CR	0

Kelola usaha

	Tidak ada unit usaha yang dihasilkan KTH	Tidak ada sosialisasi dari pemerintah dalam membuat usaha
Tidak ada unit usaha yang dihasilkan KTH	1	0,44
Tidak ada sosialisasi dari pemerintah dalam membuat usaha	2,25	1
Total	3,25	1,44

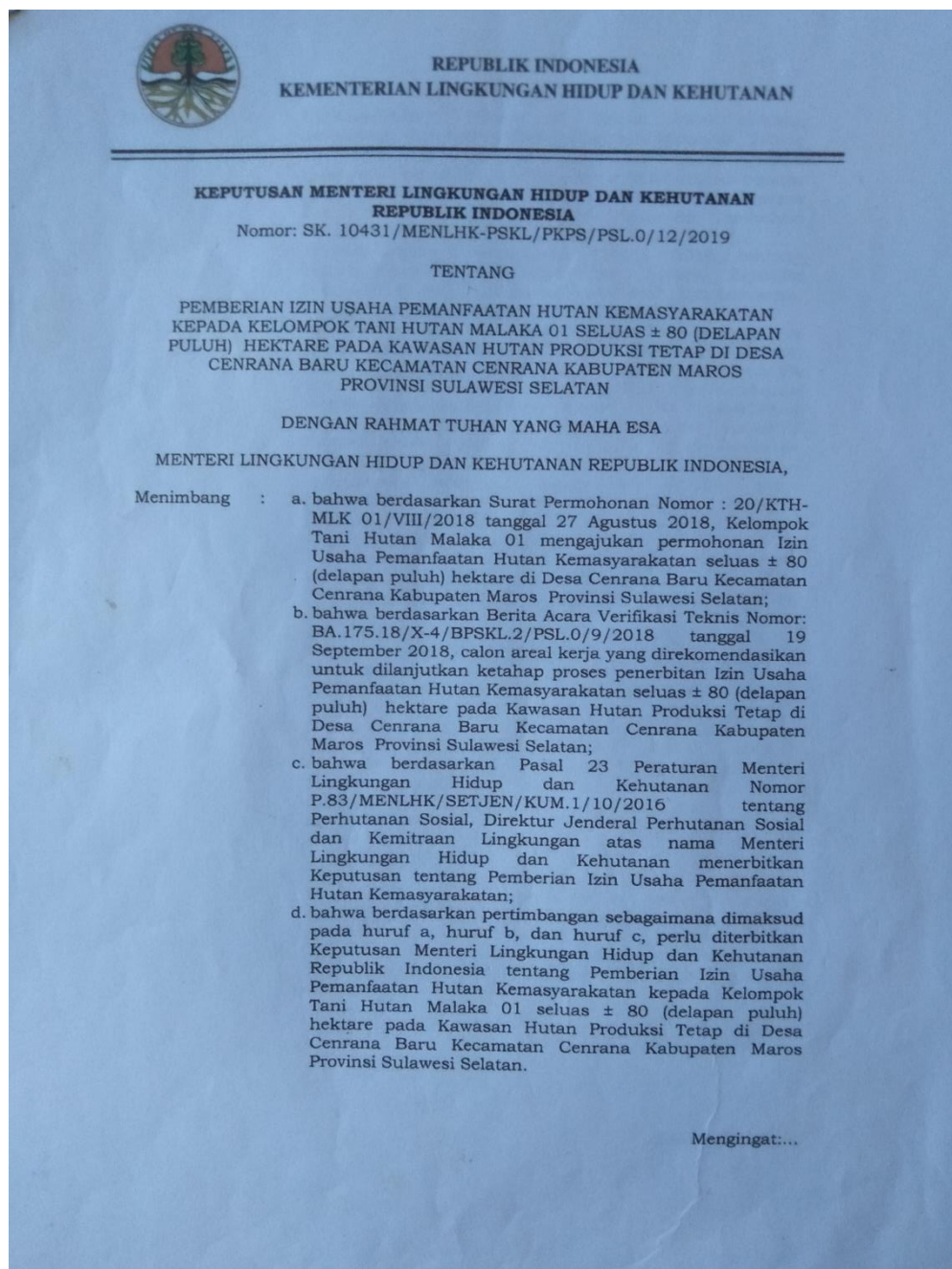
	Tidak ada unit usaha yang dihasilkan KTH	Tidak ada sosialisasi dari pemerintah dalam membuat usaha	Total	Eigen Vektor	Lamda
Tidak ada unit usaha yang dihasilkan KTH	0,31	0,31	0,62	0,31	1
Tidak ada sosialisasi dari pemerintah dalam membuat usaha	0,69	0,69	1,38	0,69	1
Total	1	1	2	1	2

CI	0
RI	0
CR	0

Lampiran 8. Matriks gabungan

Aspek	Bobot	Indikator	Prioritas Lokal	Prioritas Global
Kelola Kelembagaan	0,33	Adanya akses legal berupa IUPHKm	0,09	0,03
		Adanya struktur kepengurusan kelompok	0,14	0,05
		Dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas	0,32	0,10
		Adanya pendamping KTH	0,46	0,15
		Kepengurusan KTH belum berjalan sesuai fungsinya	0,16	0,05
		Pertemuan KTH tidak rutin	0,24	0,08
		Kurangnya keterlibatan anggota dalam pembentukan kelembagaan KTH	0,30	0,10
		Pendamping tidak aktif dalam hal memantau kegiatan KTH	0,19	0,06
Kelola Kawasan	0,33	Adanya potensi pemanfaatan jasa lingkungan	0,29	0,10
		Adanya sarana prasarana yang mendukung dalam pengelolaan HKm	0,33	0,11
		Kurangnya partisipasi anggota dalam pengelolaan HKm	0,25	0,08
		Tanaman agroforestri belum dikembangkan dengan baik	0,75	0,25
Kelola Usaha	0,33	Adanya perusahaan bermitra dengan KTH	0,38	0,13
		Tidak ada unit usaha yang dihasilkan KTH	0,31	0,10
		Tidak ada sosialisasi dari pemerintah dalam membuat usaha	0,69	0,23

Lampiran 9. Surat Keputusan



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN
HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN MALAKA 01
SELUAS ± 80 (DELAPAN PULUH) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN
PRODUKSI TETAP DI DESA CENRANA BARU KECAMATAN CENRANA
KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : SK. 10431/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019
TANGGAL : 26 DESEMBER 2019

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN MALAKA 01
PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN
DI DESA CENRANA BARU KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT
1	Munir	L	7309101805670001	Desa Cenrana Baru
2	Murdiyanto	L	7309102610910001	Desa Cenrana Baru
3	Sudirman	L	7309101212750002	Desa Cenrana Baru
4	Sadaruddin	L	7309100101740003	Desa Cenrana Baru
5	Abdul Haris	L	7309100107630016	Desa Cenrana Baru
6	Anwar	L	7309101506770001	Desa Cenrana Baru
7	Suherman	L	7309101005780002	Desa Cenrana Baru
8	H.M.P.Mangung	L	7309100101510009	Desa Cenrana Baru
9	Marwansah	L	7309100406750001	Desa Cenrana Baru
10	H.Mugira P.Tappa	L	7309100101570011	Desa Cenrana Baru
11	Muhammad Basri	L	7309100107560017	Desa Cenrana Baru
12	Kaharuddin	L	7309100101700005	Desa Cenrana Baru
13	Sulistio	L	7309101410660001	Desa Cenrana Baru
14	Abd. Salam, SH.	L	7309100111460002	Desa Cenrana Baru
15	H. Muslimin	L	7309100101700023	Desa Cenrana Baru
16	H. AKbar	L	7309100101660002	Desa Cenrana Baru
17	H. Abd. Kadir	L	7309103112440004	Desa Cenrana Baru
18	Makmur	L	7309100101720018	Desa Cenrana Baru
19	Muhammad Idrus	L	7309103112600028	Desa Cenrana Baru
20	Saharuddin	L	7309100101750020	Desa Cenrana Baru
21	Fadli	L	7309100806940001	Desa Cenrana Baru
22	A. Manggasali	L	7309100403710001	Desa Cenrana Baru
23	Nurdin	L	7309102708790002	Desa Cenrana Baru
24	Muhammad Nur	L	7309100610740001	Desa Cenrana Baru
25	Arapah	L	7309100101620002	Desa Cenrana Baru
26	M.Saleh	L	7309100101720007	Desa Cenrana Baru
27	Mallaranggeng	L	7309100101780010	Desa Cenrana Baru
28	Anwar	L	7309103001830001	Desa Cenrana Baru
29	Amir	L	7309100101730011	Desa Cenrana Baru
30	Baso	L	7309100101680004	Desa Cenrana Baru
31	Hare	L	7309100101650007	Desa Cenrana Baru
32	Risal	L	7309100401000003	Desa Cenrana Baru
33	Juhria	P	7309104101740018	Desa Cenrana Baru

34. Hapsa...

34	Hapsa	P	7309104101740006	Desa Cernana Baru
35	Irawati	P	7309104107830004	Desa Cernana Baru
36	Manisi	P	7309104101370005	Desa Cernana Baru
37	Abd. Muing	L	7309100101530001	Desa Cernana Baru
38	Amiruddin	L	7309100107660055	Desa Cernana Baru

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan ketua KTH Malaka 01



Wawancara dengan anggota KTH Malaka 01



Wawancara dengan anggota KTH Malaka 01



Wawancara dengan anggota KTH Malaka 01



Papan nama sekretariat KTH Malaka 01



Struktur organisasi KTH Malaka 01